



Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Kemiskinan

Karningsih Karningsih^{1*}, Christine Diah Wahyuningsih²

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

karningsih3224@gmail.com^{1*}, chrisayudia2801@gmail.com²

Korespondensi Penulis: karningsih3224@gmail.com*

Abstract. *This study uses a qualitative research method with data collection techniques using observation, interviews and documentation. Research informants are determined purposively. Factors for the implementation of PKH are good communication between implementers and PKH recipients, as well as with the support of resources that have been provided by the government, both from human resources and financial resources. The open attitude of program implementers in providing information on the use of funds so that they are not misused. Meanwhile, the inhibiting factor for the implementation of PKH is that the data on beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) is not on target. The implication of this policy is that assistance is still needed for PKH beneficiary communities to be further improved, as well as the existence of a bureaucratic structure in each region or environment of PKH beneficiary communities so that data updates can be well integrated, and carried out periodically and sustainably.*

Keywords: *Implementation, Program, Family, Hope, Poverty*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan dengan purposive. Faktor pendukung dari implementasi PKH adalah terjalannya komunikasi yang baik antara pelaksana dengan penerima PKH, serta dengan dukungan sumberdaya yang sudah disediakan oleh pemerintah baik dari sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Sikap terbuka dari pelaksana program dalam memberikan informasi tentang penggunaan dana supaya tidak disalahgunakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat implementasi PKH adalah data penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) tidak tepat sasaran. Implikasi dari kebijakan ini adalah masih diperlukan pendampingan terhadap masyarakat penerima manfaat PKH supaya lebih ditingkatkan lagi, juga adanya struktur birokrasi di setiap wilayah atau lingkungan masyarakat penerima manfaat PKH sehingga pemutakhiran data dapat terintegrasi secara baik, dilakukan secara berkala dan berkelanjutan

Kata Kunci : Implementasi, Program, Keluarga, Harapan, Kemiskinan

1. PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk melindungi kerentanan terhadap ibu hamil dan anak-anak yang bersekolah sehingga dapat mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sasaran PKH adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang sesuai dengan kriteria PKH yaitu memiliki ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat SD-SMA. Besar bantuan untuk setiap kategori berbeda-beda. Bantuan diberikan secara bertahap yaitu setiap 3 bulan dan tentunya tidak semua anggota KPM PKH menerima bantuan, karena didalam ketentuan yang menerima bantuan maksimal sebanyak 4 orang.

Penduduk desa Tamangede jumlahnya 1.712 KK dan yang tergolong dalam RTSM berjumlah 650 KK. Sedangkan yang mendapatkan program bantuan PKH hanya sebanyak 247 KK, hal ini belum merata bahkan tidak sampai setengah dari jumlah RTSM, persentase yang

menerima PKH hanya 38%, Hal ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan belum dapat diimplementasikan secara merata kepada setiap RTSM.

Faktor penting pelaksanaan program tidak terlepas dari peran tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap RTSM yang menerima dana bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikan dan kesehatan, karena kebanyakan KPM memiliki tingkat pendidikan yang rendah (Pedoman Pelaksanaan PKH 2021).

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), kriteria penerima PKH memiliki tiga komponen, yaitu: keluarga miskin dan rentan yang memiliki anggota keluarga: ibu hamil dan/atau menyusui, anak usia sekolah (5-21 tahun), dan/atau anggota keluarga yang lanjut usia atau memiliki disabilitas berat dan permanen.

Jumlah KPM komponen kesehatan di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh tahun 2024 yaitu komponen ibu hamil berjumlah 3 orang, kriteria komponen Bayi/Balita 0-6 tahun berjumlah 10 orang, dan total komponen kesehatan yaitu 13 orang, semua anggota KPM yang termasuk dalam kriteria komponen menerima bantuan tersebut. Sedangkan jumlah KPM komponen Pendidikan tahun 2024 yaitu komponen SD/Sederajat berjumlah 117 orang, komponen SMP/Sederajat berjumlah 73 orang, komponen SMA/Sederajat berjumlah 59 orang, dan total komponen pendidikan yaitu 249 orang, komponen lansia berjumlah 59 orang, komponen disabilitas berat berjumlah 3 orang, dan total komponen kesejahteraan sosial berjumlah 62 orang. Sehingga total komponen yang menerima bantuan sebanyak 324 orang, dalam pelaksanaannya keluarga penerima manfaat, menggunakan bantuan untuk keperluan lain, seperti belanja pakaian dan hal-hal yang lainnya yang tidak sesuai dengan peraturannya. Tujuan PKH adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, maka perlu adanya transformasi perubahan kesejahteraan hidup kelompok penerima manfaat.

Berdasarkan fenomena diatas maka tulisan ini membahas tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

2. METODE

Metode penelitian adalah kualitatif dimana berupaya menafsirkan makna dari data , sehingga dapat membantu memahami kehidupan sosial melalui sudut pandang partisipan secara deskriptif, metode riset ini lebih bersifat memberikan gambaran secara jelas suatu permasalahan fakta di lapangan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik

purposive sampling, yaitu teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian, karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan .

Teknik analisis data dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program

Implementasi berasal dari kata "*to implement*", yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan memberikan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menurut George Edward III, seorang teoritikus kebijakan publik, implementasi kebijakan sangat penting, Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Komunikasi mencakup pertukaran informasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi dana, waktu, dan personel yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi merujuk pada sikap dan motivasi para pelaku kebijakan. Struktur birokrasi mencakup aturan, prosedur, dan hierarki dalam organisasi pemerintahan (Subarsono, 2018).

Program Keluarga Harapan (PKH)

Kebijakan pemerintah dalam menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. Program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga secara jangka pendek, serta memutuskan siklus kemiskinan secara jangka panjang. Secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan adalah meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH, meningkatkan kualitas kesehatan keluarga peserta, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta, mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan terpeliharanya taraf kehidupan sosial keluarga.

Sasaran penerima PKH Berdasarkan Pasal 3, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di sebutkan bahwa, Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan,

pendidikan, dan/atau kesejahteraan (Permensos, 2018).

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tamangede. Belum sepenuhnya dapat mengurangi jumlah penduduk rentan, hal ini seperti yang disampaikan melalui wawancara oleh Kasi Kesra Nisrohah menyatakan “Program Keluarga Harapan (PKH) belum bisa mengurangi angka kemiskinan ,” Dilain pihak Koordianator Program Keluarga Harapan (PKH) Sutomo “Semestinya bisa, soalnya kan masyarakat sedikit banyak sudah membantu dengan adanya bantuan untuk biaya Pendidikan dan Kesehatan yang semula ditanggung oleh keluarga sekarang sudah digratiskan pemerintah. Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Masduki yang menyatakan “ seharusnya masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu biaya kesehatan dan pendidikan anak, karena bagaimanapun juga sektor tersebut sering membutuhkan pengeluaran paling besar meskipun dalam prakteknya tidak rutin seperti pengeluaran kebutuhan pokok lainnya” demikian pula dengan pernyataan dari Koordianator Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tamangede Sutomo “.Bantuan dari program Keluarga harapan , belum dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, meskipun penerima manfaat tahu, kalau tujuan dari Program Keluarga Harapan memberi bantuan pendidikan untuk anak kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan ketingkat lebih tinggi, seharusnya bantuan dapat mengurangi pengeluaran keluarga pada biaya kesehatan dan pendidikan.

Wawancara lebih lanjut dari penerima manfaat Program PKH dengan Ibu Siti Fatonah “Dari bantuan PKH ini saya bisa buat tambahan bayar sekolah anak, bayar listrik dan buat tambahan uang belanja . Jadinya uang dari jatah suami bisa saya tabung mbak”. Sedangkan menurut penerima manfaat Ibu Sri Rahayu “Alhamdulillah sangat mengurangi pengeluaran saya mbak, saya dari bantuan PKH ini saya kumpulkan untuk beli grobak untuk jualan es teh dan membuka usaha”.

Sebagian dari mereka sudah berfikir untuk dapat mengembangkan usaha keluarganya dengan membuka warung atau toko bahkan ada yang membuat suatu produk jadi seperti makanan atau cemilan, juga sudah mulai mengembangkan usahanya dengan menitipkan produknya pada toko-toko serta warung makan yang ada di sekitar Desa Tamangede. Kemudian menurut koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) desa Tamangede kalau dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) juga bisa merubah pola pikir masyarakat, buktinya sekarang ini sudah mulai muncul usaha kecil yang dibuat oleh masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) .

Berdasarkan pernyataan dari narasumber sebagaimana diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat merubah perilaku masyarakat

penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari yang hanya berfikir tentang pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari, bisa membuka lapangan pekerjaan baru seperti jualan/berdagang., karena tidak mengeluarkan biaya sekolah dan kesehatan. Begitupun dengan apa yang dinyatakan oleh koordinator Program Keluarga Harapan menyatakan “saya lihat kalau mengadakan pertemuan dengan masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) banyak dari mereka yang sudah membuka usaha ekonomi seperti warung dan produk olahan seperti makanan ringan yang dititipkan di warung di wilayah Kota Kendal”.

Faktor Pendukung Implementasi Program PKH

Komunikasi adalah salah satu faktor penting untuk mendukung setiap pelaksanaan kegiatan program PKH, komunikasi antara pendamping PKH dengan pemerintah desa maupun antara pendamping PKH dengan penerima manfaat program PKH sudah baik. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya dukungan pemerintah desa pada pendamping program PKH di Desa dengan menyediakan Gedung pertemuan di Balai desa serta memfasilitasi pendamping PKH saat sosialisasi mengenai program PKH pada masyarakat penerima manfaat program PKH.

Menurut Kasi Kesra Kecamatan Gemuh “komunikasi yang terjalin antara stekholder pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terjalin dengan baik, untuk itu dalam penyampaian informasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Tamangede dapat berjalan dengan baik sekaligus mengundang tokoh masyarakat pada saat penyampaian informasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pendamping/ fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH), ini sejalan dengan pernyataan Kepala Desa Tamangede dimana beliau menyatakan kalau komunikasi antara pelaksana kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pemerintah desa Tamangede terjalin dengan baik .Hal ini dibuktikan dari wawancara dengan informan penerima manfaat PKH, Ibu Sri Rahayu menuturkan bahwa informasi program PKH yang diberikan sudah jelas dan mudah dipahami. Begitu juga dengan pendapat Ibu Siti Fatonah bahwa pihak pelaksana program PKH dari awal sebelum menerima bantuan sudah dilakukan sosialisasi dari pihak Dinas Sosial dan juga pendamping, mereka memberi tahu tujuan dari diberikannya bantuan ini dan digunakan untuk apa saja uang yang kami terima. Untuk pendamping juga rutin melakukan pertemuan dengan kami, dan selalu memberi informasi ketika dana bantuan akan dicairkan.

Berdasarkan keterangan dari informan sebagaimana diatas maka dapat menunjukkan bahwa pada dasarnya komunikasi antara pelaksana kegiatan dan masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Tamangede sudah berjalan dengan baik, sehingga

mendukung proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) .

Selain komunikasi ,Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting yang sering menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan sebuah program baik sumberdaya manusia maupun finansial dan untuk melihat sumberdaya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Tamangede dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini: Menurut Kasi Kesra Kecamatan Gemuh “sumberdaya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah cukup baik dari sumberdaya manusia maupun finansial hal tersebut disebabkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program nasional yang pastinya akan didampingi dengan sumberdaya yang memadai”. Begitupun dengan pernyataan dari Kepala Desa Desa Tamangede dimana beliau juga menyatakan “kalau sumberdaya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terutama di Desa Tamangede dapat berjalan dengan baik tanpa ada masalah dengan keluarga penerima manfaat PKH”.

Menurut Ibu Siti Fatonah sebagai penerima program PKH beliau menjelaskan “Ya pendamping pasti tahu mbak, mereka sebagai pelaksana kalau tidak tahu ya tidak mungkin program PKH bisa terlaksana ”. Hal ini juga jawaban dari penerima program PKH lain dengan Ibu Mukhayatun menuturkan “Sudah pastinya dari pihak Desa tahu program PKH mbak, kalau mereka tidak tahu program ini yang mungkin tidak bisa jalan, mestinya mereka yang ditunjuk sebagai pelaksana pasti sudah paham betul tentang pelaksanaan program PKH”.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana di atas maka dapat menunjukkan kalau sumberdaya sebagai pendukung Program Keluarga Harapan (PKH) sudah baik dari sumberdaya manusianya maupun dari sumberdaya finansialnya hal tersebut dikarenakan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program nasional yang dibiayai oleh APBN .

Pelaksanaan program akan dapat diterima oleh kelompok penerima manfaat, tidak terlepas dari sikap dari implementatornya yang disebut disposisi, berkaitan dengan disposisi yaitu kecenderungan serta karakteristik dari pelaksana kegiatan program dalam mengambil perannya baik dalam sikap serta perilaku, dalam melaksanakan tugasnya ,pendamping program selaku pelaksana program sudah melakukan dengan sikap yang sopan serta berperilaku yang baik sehingga baik pemerintah desa maupun masyarakat penerima manfaat program PKH dapat menerima setiap ketentuan yang di berikan oleh pendamping serta berperilaku baik hal ini sesuai dengan yang diutarakan informan berikut ini: Menurut Kasi Kesra Kecamatan Gemuh” sikap pelaksana program sudah baik dan sopan bahkan saat menyampaikan informasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga menyampaikan dengan kata-kata yang sopan dan di sesuaikan dengan adat istiadat lingkungan masyarakat . Sedangkan menurut Kepala Desa Tamangede menyatakan kalau dalam melaksanakan tugasnya pelaksanaan

Program Keluarga Harapan (PKH) dilokasi atau wilayah administrasi Desa saya pada umumnya dan Tamangede pada Khususnya sudah melaksanakan dengan sikap dan perilaku yang baik dan dengan sopan santun yang baik juga.

Menurut penerima program PKH di Desa Tamngede Ibu Siti Fotonah menjelaskan “Pendamping PKH joss bener mbak, ya masih tetangga saya kok mbak jadi kalau ada info langsung di kasih tahu” dan hal yang sama dengan Ibu Mukhyatun “Petugas PKH sudah baik dalam pendampingan mbak, biasanya malah datang kerumah saya mbak, bantuan PKH sudah cair” dan pendapat peserta penerima manfaat PKH lain dengan Ibu Jupami Menuturkan “Sudah baik sekali mbak, buktinya kalau saya tidak bisa kumpulan di desa saya dijemput mbak” Berdasarkan dari pernyataan dari informan di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya implementator program bersikap sopan dan perilaku baik.

Setiap pelaksanaan program pemerintah struktur birokrasi akan mendapatkan peran yang vital untuk kelancaran proses kegiatan hal tersebut dikarenakan posisi birokrasi sebagai jembatan utama dalam setiap penyampaian informasi mengenai program, adanya struktur biroktasi yang jelas akan dapat memberikan kejelasan pada setiap pelaksanaan program karena secara tidak langsung akan berkaitan dengan tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing sektor pelaksana kegiatan.

Stuktur birokrasi merupakan salah satu prosedur atau pola yang mengatur agar implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik, struktur birokrasi yang baik juga dapat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implemenntasi dari suatu program, selain itu ketersediaan SOP sebagai landasan pelaksanaan program juga untuk mempertegas setiap aturan dalam implementasi program, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber berikut: Menurut Kasi Kesra Kecamatan Gemuh menyatakan kalau dalam melaksanakan tugas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) juga didampingi SOP, kalau masalah struktur birokrasinya tidak ada .Menurut Kepala Desa Tamangede menyatakan kalau ada SOP sebagai landasan kerja bagi pelaksana program. Begitupun dengan pernyataan dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Kecamatan menyatakan kalau dalam melaksanakan tugasnya sesuai SOP, kemudian kalau untuk struktur organisasi yang menangani Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tamangede tidak ada, hanya satu orang keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai kordinator penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) , untuk pembagian tugasnya tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) sudah di lengkapi dengan SOP sebagai landasan saat melaksanakan tugasnya kemudian untuk struktur organisasi pelaksanaan

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak ada, sehingga hanya dibutuhkan satu orang ketua kelompok masyarakat keluarga penerima manfaat (KPM) yang bertugas untuk berkoordinasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kecamatan.

Faktor Penghambat Implementasi Program PKH

Setiap proses pelaksanaan program pemerintah tentunya tidak akan pernah terhindar dari faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program baik yang muncul dari segi internal maupun external, namun dalam pelaksanaan program PKH faktor yang bisa menghambat dari segi internal dimana setiap data masyarakat penerima manfaat program PKH yang di dapat oleh pelaksana program PKH berupa data jadi dari pemerintah pusat dan hal tersebut menjadi penghambat utama dalam proses pelaksanaan program PKH, karena salah sasaran pada masyarakat penerima manfaat program PKH adalah masyarakat yang di anggap mampu, sehingga secara tidak langsung dapat menimbulkan kecemburuan pada masyarakat yang tidak menerima bantuan. Faktor eksternal masyarakat diluar penerima manfaat PKH tidak dapat melaporkan kondisi di wilayahnya ketika mengetahui pemberian bantuan PKH yang salah sasaran, dan mereka tidak mengetahui mekanismenya.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi kemiskinan di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan serta tujuan dari program Keluarga Harapan (PKH), hal ini dapat diketahui dengan adanya peningkatan taraf hidup, yang disertai adanya pengurangan pengeluaran keluarga untuk biaya pendidikan dan kesehatan, adanya perubahan perilaku masyarakat akan pentingnya masa depan anak untuk bersekolah dan menjaga kesehatan lansia, dan ibu hamil, sehingga setiap keluarga penerima manfaat PKH dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pemanfaatan bantuan pada penerima manfaat masih ada yang belum sesuai dengan peruntukan karena tidak untuk biaya pendidikan sekolah anak dan kesehatan tetapi untuk biaya hidup terutama untuk makan dan keperluan sekunder lainnya, yaitu membuka usaha toko/warung serta produk jasa lainnya.

Faktor pendukung dari Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi kemiskinan dengan melalui komunikasi yang baik antara pelaksana program PKH dan penerima PKH, juga dukungan sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Petugas pelaksana PKH sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan sikap yang sopan dan

perilaku sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Adanya data penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran karena data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) langsung dipilih dan ditentukan oleh pemerintah pusat, dimana pemerintah pusat tidak melihat secara langsung kondisi masyarakat dibawah. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan pada masyarakat, karena pada praktiknya penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) adalah keluarga yang dianggap mampu dilingkungan masyarakat tersebut, serta adanya Struktur birokrasi yang kurang jelas pembagian kerja

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Cet. XII). Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomi otonomi daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Dwi Nurani. (2009). *Analisis implementasi*. FISIP, Universitas Indonesia.
- Kementerian Sosial RI. (2018). *Kebijakan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH)*. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Pratiwi, D. (2020). *Efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan ditinjau dari ekonomi Islam: Studi pada peserta PKH desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Saifullah. (2006). *Panduan metodologi penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN.
- Subarsono, A. G. (2002). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryawati, C. (2005). *Memahami kemiskinan secara multidimensional*. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3).
- Syahriani. (2016). *Kontribusi program keluarga harapan (PKH) dalam menunjang pendidikan siswa kurang mampu di Desa Marioraja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*. Tesis, Fakultas Ilmu Sosial.
- UU Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perkembangan Pendudukan dan Pembangunan Keluarga.
- UU RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan dari formulasi kebijaksanaan implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.